



**MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN**

**NOMOR : KM 26 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**MEKANISME FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENETAPAN TARIF BATAS  
ATAS PENUMPANG PELAYANAN KELAS EKONOMI ANGKUTAN UDARA NIAGA  
BERJADWAL DALAM NEGERI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERHUBUNGAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, telah diatur ketentuan mengenai tarif angkutan penumpang;
  - b. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan kepada konsumen dan badan usaha angkutan udara niaga berjadwal dari persaingan usaha tidak sehat, perlu ditetapkan tarif batas atas;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Mekanisme Formulasi Perhitungan dan Penetapan Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri dengan Peraturan Menteri Perhubungan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2720);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1995 tentang Angkutan Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3610) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1995 tentang Angkutan Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3925);
4. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008;
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 43 Tahun 2005 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 20 Tahun 2008;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG MEKANISME FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENETAPAN TARIF BATAS ATAS PENUMPANG PELAYANAN KELAS EKONOMI ANGKUTAN UDARA NIAGA BERJADWAL DALAM NEGERI.**

**BAB I**

**PENGERTIAN**

**Pasal 1**

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Tarif penumpang pelayanan kelas ekonomi angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri adalah harga jasa pada suatu rute tertentu di dalam negeri atas pelayanan angkutan penumpang kelas ekonomi.

2. Tarif dasar adalah besaran tarif per penumpang kilometer yang dinyatakan dalam rupiah.
3. Tarif jarak adalah besaran tarif per rute penerbangan per satu kali penerbangan, untuk setiap penumpang yang merupakan hasil perkalian antara tarif dasar dengan jarak serta dengan memperhatikan kemampuan daya beli.
4. Biaya adalah nilai uang atas kegiatan baik berupa pengeluaran maupun bukan pengeluaran yang digunakan untuk mendapatkan hasil produksi.
5. Tarif normal adalah tarif jarak tertinggi yang ditetapkan oleh badan usaha angkutan udara.
6. Tarif batas atas adalah harga jasa tertinggi/maksimum yang diijinkan diberlakukan oleh badan usaha angkutan udara udara niaga berjadwal, yang dihitung berdasarkan komponen tarif jarak, pajak pertambahan nilai, iuran wajib asuransi dan biaya tuslah/tambahan (*surcharge*).
7. Jarak adalah rata-rata jarak terbang pesawat udara, dalam kilometer pada suatu rute penerbangan yang ditetapkan oleh pemerintah.
8. Badan usaha angkutan udara adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum Indonesia berbentuk perseroan terbatas atau koperasi, yang kegiatan utamanya mengoperasikan pesawat udara untuk digunakan mengangkut penumpang, kargo, dan/atau pos dengan memungut pembayaran.
9. *Full Service* adalah badan usaha angkutan udara niaga berjadwal yang didalam menjalankan kegiatannya dengan standar maksimum.
10. *Medium Service* adalah badan usaha angkutan udara niaga berjadwal yang didalam menjalankan kegiatannya dengan standar menengah.
11. *No Frills* adalah badan usaha angkutan udara niaga berjadwal yang yang didalam menjalankan kegiatannya dengan standar minimum.
12. Menteri adalah menteri yang membidangi urusan penerbangan.

13. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Udara.

## **BAB II**

### **MEKANISME PENETAPAN TARIF**

#### **Pasal 2**

- (1) Tarif penumpang pelayanan kelas ekonomi angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri dihitung berdasarkan komponen tarif jarak, pajak, iuran wajib asuransi dan biaya tuslah/tambahan (surcharge), yang merupakan tarif batas atas.
- (2) Tarif jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah besaran tarif per rute penerbangan per satu kali penerbangan, untuk setiap penumpang yang merupakan hasil perkalian antara tarif dasar dengan jarak serta dengan memperhatikan kemampuan daya beli.
- (3) Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPn) yang dikenakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (4) Iuran wajib asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah asuransi pertanggung jawaban kecelakaan penumpang yang dikenakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang dana pertanggung jawaban wajib kecelakaan penumpang yang besarnya ditetapkan oleh Peraturan Menteri Keuangan.
- (5) Biaya tuslah/tambahan (surcharge) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan biaya yang dikenakan karena terdapat biaya-biaya tambahan yang dikeluarkan oleh badan usaha angkutan udara diluar perhitungan penetapan tarif jarak, yang penerapannya bersifat khusus yaitu karena kondisi dan waktu pemberlakuan tertentu, dan besarnya ditetapkan oleh Menteri dalam peraturan tersendiri.
- (6) Tarif penumpang pelayanan kelas ekonomi angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibedakan berdasarkan atas tarif angkutan udara yang menggunakan pesawat udara jenis propeller dan jet.
- (7) Tarif penumpang pelayanan kelas ekonomi angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri yang menggunakan pesawat udara jenis propeller untuk jarak terbang kurang dari 600 km.

- (8) Tarif penumpang pelayanan kelas ekonomi angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri yang menggunakan pesawat udara jenis jet untuk jarak terbang lebih dari 300 km.

### Pasal 3

Besaran tarif jarak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.

### Pasal 4

- (1) Besaran tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diusulkan oleh Direktur Jenderal kepada Menteri untuk ditetapkan setelah dilakukan koordinasi dengan:
- a. asosiasi penerbangan nasional;
  - b. asosiasi pengguna jasa penerbangan.
- (2) Usulan penetapan besaran tarif dasar dan tarif jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dengan melampirkan:
- a. perhitungan biaya operasi pesawat udara;
  - b. justifikasi penyesuaian tarif dasar dan atau tarif jarak;
  - c. hasil bahasan dengan masyarakat transportasi udara.

### Pasal 5

- (1) Besaran tarif dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan berdasarkan kelompok pelayanan yang diberikan oleh badan usaha angkutan udara.
- (2) Besaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. penerapan tarif 100% (seratus persen) dari tarif maksimum untuk badan usaha angkutan udara yang memberikan pelayanan dengan standar maksimum (*full services*);
  - b. penerapan tarif setinggi-tingginya 90% (sembilan puluh persen) dari tarif maksimum, untuk pelayanan dengan standar menengah (*medium services*);

- c. penerapan tarif setinggi-tingginya 85% (delapan puluh lima) dari tarif maksimum, untuk pelayanan dengan standar minimum (*no frills services*).

#### Pasal 6

- (1) Besaran tarif yang telah ditetapkan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, harus dipublikasikan melalui media cetak dan elektronik kepada konsumen.
- (2) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) hari kerja sebelum tarif diberlakukan.

#### Pasal 7

- (1) Direktur Jenderal melakukan evaluasi terhadap besaran tarif yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 setiap 1 (satu) tahun atau apabila terjadi perubahan signifikan yang mempengaruhi kelangsungan kegiatan badan usaha angkutan udara.
- (2) Perubahan signifikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. perubahan terhadap harga avtur apabila telah mencapai lebih dari Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah)/liter dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan berturut-turut atau;
  - b. perubahan terhadap harga nilai tukar rupiah dan harga komponen biaya lainnya yang menyebabkan perubahan total biaya operasi pesawat udara hingga paling sedikit 10% dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan berturut-turut.
- (3) Apabila terjadi perubahan seperti yang tersebut pada ayat (2), maka pemerintah akan melakukan evaluasi terhadap besaran tarif atau menerapkan *surcharge*/tuslah yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Perhubungan.
- (4) Dalam keadaan tertentu, antara lain badan usaha angkutan niaga berjadwal menanggung biaya karena pada saat berangkat dan pulang penerbangan tanpa penumpang (hari raya), maka Menteri Perhubungan dapat menerapkan biaya tuslah/tambahan (*surcharge*).

### Pasal 8

Apabila terdapat rute baru dan besaran tarifnya belum tercantum dalam lampiran Peraturan Menteri ini, Direktur Jenderal Perhubungan Udara untuk sementara dapat menetapkan tarif dengan formula perhitungan seperti dalam Pasal 12.

### Pasal 9

- (1) Badan usaha angkutan udara niaga berjadwal wajib menetapkan besaran tarif normal.
- (2) Tarif normal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh melebihi tarif batas atas yang ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Tarif normal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Direktur Jenderal paling lama 15 (lima belas) hari kalender sebelum diberlakukan.
- (4) Tarif normal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diinformasikan kepada pengguna jasa melalui media cetak dan media elektronik paling lambat 15 (lima belas) hari kalender sebelum diberlakukan.

## BAB III

### FORMULA PERHITUNGAN TARIF

#### Pasal 10

- (1) Tarif dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diperoleh dari hasil perhitungan biaya pokok rata-rata per satuan unit produksi ditambah keuntungan.
- (2) Biaya pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari komponen biaya, yaitu:
  - a. biaya langsung, terdiri dari biaya tetap dan biaya *variable*;
  - b. biaya tidak langsung terdiri dari biaya organisasi dan biaya pemasaran.
- (3) Rincian komponen biaya jasa angkutan udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termuat dalam Lampiran I Peraturan ini.

- (4) Rincian cara perhitungan biaya jasa angkutan udara termuat dalam Lampiran II Peraturan ini.

#### Pasal 11

Perhitungan tarif dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 didasarkan pada prinsip sebagai berikut:

- a. perhitungan biaya pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) adalah total biaya operasi pesawat udara berdasarkan biaya penuh (*full costing*) termasuk tingkat keuntungan (*margin*) maksimal sebesar 10%.
- b. data komponen biaya yang digunakan dalam perhitungan, adalah data keuangan badan usaha angkutan udara pada saat penyusunan tarif dengan memperhatikan tingkat akurasi, kewajaran dan efisiensi biaya serta dapat dipertanggungjawabkan.
- c. biaya operasi pesawat udara yang akan digunakan sebagai dasar penetapan tarif dasar dan tarif jarak adalah rata-rata biaya operasi pesawat udara seluruh tipe pesawat yang dioperasikan oleh masing-masing badan usaha angkutan udara.
- d. pembebanan biaya operasi pesawat udara dalam perhitungan tarif dasar angkutan udara penumpang kelas ekonomi dengan menggunakan pesawat jet ditetapkan sebesar 95% dari total biaya operasi.
- e. biaya per unit (*cost per unit*) adalah biaya per penumpang kilometer yang diperoleh dari biaya total operasi pesawat udara dengan faktor muat sebesar 65% (enam puluh lima persen) untuk pesawat jet dan 70% (tujuh puluh persen) untuk pesawat propeller.

#### Pasal 12

- (1) Tarif dasar penumpang pelayanan ekonomi sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ditetapkan sebagai berikut:

No	Kelompok Jarak (Km)	Tarif Dasar per Pnp – KM Rp
	Pesawat Propeller	
1.	Dibawah 150	3.200
2.	150 s/d 225	3.080



3.	226 s/d 300	2.820
4.	301 s/d 375	2.770
5.	376 s/d 450	2.650
6.	451 s/d 600	2.440
	<b>Pesawat jet</b>	
1.	301 s/d 375	2.070
2.	376 s/d 450	2.000
3.	451 s/d 600	1.900
4.	601 s/d 750	1.790
5.	751 s/d 900	1.550
6.	901 s/d 1.050	1.420
7.	1.051 s/d 1.400	1.370
8.	diatas 1.400	1.190

- (2) Besaran tarif penumpang pelayanan kelas ekonomi angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri setiap rute penerbangan untuk pelayanan dengan menggunakan pesawat udara jenis jet tercantum dalam Lampiran III Peraturan ini.
- (3) Besaran tarif penumpang pelayanan kelas ekonomi angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri setiap rute penerbangan untuk pelayanan dengan menggunakan pesawat udara jenis propeller tercantum dalam Lampiran IV Peraturan ini.

## **BAB IV**

### **PENGAWASAN DAN SANKSI**

#### **Pasal 13**

- (1) Direktur Jenderal melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan ini.
- (2) Dalam melakukan pengawasan Direktur Jenderal dapat memanfaatkan laporan masyarakat/pengguna jasa yang dilengkapi dengan bukti-bukti tertulis yang mendukung.

#### **Pasal 14**

Dalam melakukan pengawasan, sebagaimana tersebut dalam Pasal 13, Direktur Jenderal dapat menggunakan alat bukti sebagai berikut:

- a. harga yang tercantum di dalam tiket dan/atau bukti pembayaran lain yang dipersamakan;
- b. pemberitaan agen (*agent news*); atau
- c. iklan dalam media cetak dan/atau elektronik.

#### Pasal 15

- (1) Badan usaha angkutan udara niaga berjadwal yang melakukan pelanggaran atas ketentuan yang diatur dalam Peraturan ini, dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. pengurangan frekuensi; atau
  - b. pembekuan rute penerbangan; atau
  - c. penundaan pemberian izin rute baru.
- (3) Pengurangan frekuensi atau pembekuan rute penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang dengan jangka waktu yang sama, bila terbukti tidak menunjukkan perbaikan.
- (4) Pemberian sanksi seperti dimaksud pada ayat (1) akan diberikan melalui tahapan peringatan I, II dan III dengan tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kalender.

### BAB V

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 16

Badan usaha angkutan udara niaga berjadwal yang mengenakan pungutan diluar ketentuan dalam peraturan ini wajib mendapat persetujuan dari Menteri.

#### Pasal 17

- (1) Harga jual tiket untuk bayi (*infant*) sebesar 10% (sepuluh persen) dari tarif normal.

- (2) Bayi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang yang berusia kurang dari 2 (dua) tahun.

#### Pasal 18

- (1) Badan usaha angkutan udara niaga berjadwal dapat memberlakukan harga jual tiket untuk anak-anak (*child*), penyandang cacat (*disable*) dan/atau veteran, orang usia lanjut setinggi-tingginya 75% (tujuh puluh lima persen) dari tarif normal.
- (2) Anak-anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang yang berusia 2 (dua) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun.
- (3) Penyandang cacat dan atau veteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat dibuktikan dengan menunjukkan kartu tanda anggota bersangkutan.
- (4) Orang lanjut usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang yang berusia di atas 60 (enam puluh) tahun dan harus dapat dibuktikan dengan menunjukkan kartu tanda penduduk.

#### Pasal 19

Badan usaha angkutan udara niaga berjadwal dapat menetapkan harga jual tiket untuk tandu (*stretcher*) setinggi-tingginya 900% (Sembilan ratus persen) dari tarif normal.

#### Pasal 20

Badan usaha angkutan udara niaga berjadwal dalam melayani rute penerbangan wajib menyediakan tempat duduk pelayanan kelas ekonomi sebagai berikut:

- a. minimal 60% (enam puluh persen) dari kapasitas tempat duduk sesuai jenis/tipe pesawat yang digunakan dan dapat dibuktikan secara fisik pemisahan kelompoknya; atau
- b. minimal 60% (enam puluh persen) dari total kapasitas per minggu untuk rute penerbangan yang dilayani dengan pesawat udara yang secara teknis sulit dilakukan pemisahan antara penumpang ekonomi dan non ekonomi.

## BAB VI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 21

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 8 Tahun 2002 tentang Mekanisme Penetapan Dan Formulasi Perhitungan Tarif Penumpang Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri kelas Ekonomi dan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 9 Tahun 2002 tentang Tarif Penumpang Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri Kelas Ekonomi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 22

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 April 2010

**MENTERI PERHUBUNGAN,**

ttd

**FREDDY NUMBERI**

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Sekretaris Negara;
4. Menteri Dalam Negeri;
5. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
6. Menteri Keuangan;
7. Para Gubernur Propinsi Seluruh Indonesia;
8. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal Perhubungan Udara, dan Para Kepala Badan di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
9. Dewan Pimpinan Pusat INACA.

SALINAN sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN



UMAR ARIS, SH, MM, MH

Pembina Tk.I (IV/b)

NIP. 19630220 198903 1 001

LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : KM 26 TAHUN 2010

TANGGAL: 14 April 2010

RINCIAN KOMPONEN BIAYA JASA ANGKUTAN UDARA

KOMPONEN BIAYA JASA ANGKUTAN UDARA	
I.	BIAYA OPERASI LANGSUNG
A.	BIAYA OPERASI LANGSUNG TETAP
	1. BIAYA PENYUSUTAN/SEWA PESAWAT UDARA
	2. BIAYA ASURANSI
	3. BIAYA GAJI TETAP CREW
	4. BIAYA GAJI TETAP TEKNISI
B.	BIAYA OPERASI LANGSUNG VARIABEL
	1. BIAYA PELUMASAN
	2. BIAYA BAHAN BAKAR MINYAK
	3. BIAYA TUNJANGAN CREW
	4. BIAYA OVERHAUL/PEMELIHARAAN
	5. BIAYA JASA KEBANDARUDARAAN
	6. BIAYA JASA PELAYANAN NAVIGASI PENERBANGAN
	7. BIAYA JASA GROUND HANDLING PENERBANGAN
	8. BIAYA CATERING PENERBANGAN
II.	BIAYA OPERASI TIDAK LANGSUNG
	1. BIAYA ORGANISASI
	2. BIAYA PEMASARAN/PENJUALAN

MENTERI PERHUBUNGAN,

ttd

FREDDY NUMBERI

SALINAN sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN



UMAR ARIS, SH, MM, MH

Pembina Tk.I (IV/b)

NIP. 19630220 198903 1 001

LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : KM 26 TAHUN 2010

TANGGAL : 14 April 2010

RINCIAN CARA PERHITUNGAN BIAYA JASA ANGKUTAN UDARA

KARAKTERISTIK PESAWAT

1. Jenis Pesawat (Jet/Non Jet)	=
2. Tipe Pesawat (Tipe pesawat yang dioperasikan untuk penerbangan)	=
3. Tahun Pembuatan Pesawat (Jika di dalam operasinya Operator menggunakan lebih dari satu pesawat, maka untuk perhitungan tahun pembuatan dapat digunakan rata-rata tertimbang)	=
4. Tahun Pembelian/Perolehan (Jika di dalam operasinya Operator menggunakan lebih dari satu pesawat, maka untuk perhitungan tahun pembelian perolehan dapat digunakan rata-rata (tertimbang))	=
5. Jumlah seluruh tipe pesawat yang dimiliki (Jumlah seluruh tipe pesawat baik jet/non jet yang dioperasikan baik untuk komersial/perintis)	= buah
6. Jam Terbang Per Tahun untuk 1 pesawat (utilisasi / penggunaan rata-rata setiap pesawat untuk komersial dan perintis)	= jam
7. Jam terbang per tahun secara total (utilisasi/penggunaan seluruh pesawat yang dimiliki baik untuk komersial maupun perintis)	= jam
8. Payload per pesawat	= Kg
9. Kapasitas Pesawat	
a. Penumpang	= Orang
b. Barang / kargo	= Kg
10. Satuan Unit Produksi Km per tahun (satuan unit x jarak terbang )	= Satuan Unit Produksi-km

RINCIAN CARA PERHITUNGAN KOMPONEN BIAYA JASA ANGKUTAN UDARA

No.	KOMPONEN BIAYA JASA ANGKUTAN UDARA
I.	BIAYA OPERASI LANGSUNG
A.	BIAYA BIAYA OPERASI LANGSUNG TETAP
	1.a. BIAYA PENYUSUTAN
	a. Penyusutan Pesawat
	1) Harga pesawat dalam US \$ Harga pesawat dapat diasumsikan atas dasar : - nilai perolehan pesawat udara, atau - harga pasar pesawat udara saat ini, atau - harga pesawat udara hasil reevaluasi, atau - harga pesawat udara berdasarkan nilai buku
	2) Nilai Konversi rupiah per US \$ prakiraan nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika
	3) Harga pesawat dalam rupiah Harga pesawat dalam US\$. dikalikan dengan nilai konversi rupiah terhadap dollar atau (1 x 2)
	4) Umur ekonomis Batas umur prakiraan pesawat dapat dioperasikan secara ekonomis / masa penyusutan : - masa penyusutan untuk pesawat baru 15 tahun - masa penyusutan untuk pesawat lama 10 tahun - untuk pesawat udara yang telah disusut habis (dibeli lebih dari 15 tahun), harus dilakukan reevaluasi guna mengetahui nilai buku pesawat udara
	5) Biaya penyusutan pertahun $\frac{3) - \text{nilai residu}}{4)}$
	$\text{nilai residu} = \text{harga pesawat} \times 10 \%$
	6) BIAYA PENYUSUTAN PESAWAT PER PENUMPANG-KM $\frac{\text{biaya penyusutan per tahun}}{\text{produksi pnp-km per tahun}}$
	b. Penyusutan Rotable
	1) Biaya penyusutan rotable per tahun $\frac{\text{harga rotable sparepart}}{\text{masa pakai}}$

No.	KOMPONEN BIAYA JASA ANGKUTAN UDARA
	<p>masa pakai : 10 tahun            harga rotable sparepart berdasarkan harga perolehan  <i>Apabila tidak tercatat harga perolehan, harga rotable sparepart diasumsikan 10 % s/d 15 % dari harga pesawat a. 1) atau a. 3)</i></p> <p>2) BIAYA PENYUSUTAN ROTABLE PER PENUMPANG-KM  <u>biaya penyusutan rotable per tahun</u>  <i>produksi pnp-km per tahun</i></p> <p>c. PENYUSUTAN ENGINE (MESIN PESAWAT)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Jumlah mesin pesawat;</li> <li>2) Harga mesin pesawat              Harga mesin pesawat berdasarkan harga perolehan X jumlah mesin</li> <li>3) Umur ekonomis mesin              Umur ekonomis mesin pesawat = umur ekonomis pesawat</li> <li>4) BIAYA PENYUSUTAN MESIN PESAWAT PER PENUMPANG-KM  <u>harga mesin pesawat</u>  <i>umur ekonomis X produksi pnp-km per tahun</i></li> </ol> <p>d. TOTAL BIAYA PENYUSUTAN PER PENUMPANG-KM              Total a. 6) + b. 2) + c. 4)</p> <p>1.b. BIAYA SEWA PESAWAT</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Total biaya sewa per tahun              Harga sewa pesawat udara dapat terdiri dari :             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aircraft, Crew, Maintenance, Insurance</li> <li>- dsb</li> </ul> </li> <li>b. BIAYA SEWA PER PENUMPANG-KM  <u>total biaya sewa per tahun</u>  <i>produksi pnp-km per tahun</i></li> </ol> <p>2. BIAYA ASURANSI</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Total biaya asuransi per tahun              Berdasarkan atas Premi yang dikeluarkan, terdiri dari :             <ul style="list-style-type: none"> <li>- hull insurance (asuransi pesawat)</li> <li>- third party legal liability (tanggung jawab terhadap pihak ketiga)</li> <li>- crew and passenger.</li> </ul> </li> </ol>



No.	KOMPONEN BIAYA JASA ANGKUTAN UDARA								
	<p>b. BIAYA ASURANSI PER PENUMPANG-KM</p> <p style="text-align: center;"><u>total biaya asuransi per tahun</u> <i>produksi pnp-km tahun</i></p>								
	<p>3. BIAYA GAJI TETAP CREW</p> <p>a. Komposisi crew per pesawat</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">- Pilot</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">orang</td> </tr> <tr> <td>- Co Pilot</td> <td style="text-align: right;">orang</td> </tr> <tr> <td>- Cabin Crew</td> <td style="text-align: right;">orang</td> </tr> <tr style="border-top: 1px solid black;"> <td style="text-align: center;"><b>Jumlah</b></td> <td style="text-align: right;"><b>orang</b></td> </tr> </table> <p>b. Biaya gaji crew per pesawat per Bulan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pilot</li> <li>- Co Pilot</li> <li>- Cabin crew</li> </ul> <p style="padding-left: 40px;">Jumlah</p> <p>c. Biaya gaji crew per pesawat per Tahun. <i>(biaya gaji crew per pesawat per bulan X 12) X jumlah set crew per pesawat</i></p> <p>d. BIAYA GAJI TETAP CREW PER PENUMPANG-KM</p> <p style="text-align: center;"><u>biaya gaji crew per pesawat per tahun</u> <i>produksi pnp-km tahun</i></p>	- Pilot	orang	- Co Pilot	orang	- Cabin Crew	orang	<b>Jumlah</b>	<b>orang</b>
- Pilot	orang								
- Co Pilot	orang								
- Cabin Crew	orang								
<b>Jumlah</b>	<b>orang</b>								
	<p>4. BIAYA GAJI TETAP TEKNISI</p> <p>a. Jumlah teknisi per pesawat                      orang</p> <p>b. Biaya gaji teknisi per pesawat per bulan</p> <p>c. Biaya Gaji Teknisi per pesawat per Tahun</p> <p style="padding-left: 40px;"><i>(biaya gaji teknisi per pesawat ( per bulan X 12) X jumlah set tenaga teknisi per pesawat</i></p> <p>d. BIAYA GAJI TETAP TEKNISI PER PENUMPANG-KM</p> <p style="text-align: center;"><u>biaya gaji teknisi per pesawat per tahun</u> <i>produksi pnp-km tahun</i></p>								
	<p>5. TOTAL BIAYA OPERASI LANGSUNG TETAP</p> <p style="padding-left: 40px;"><i>Total biaya : 1 + 2 + 3 + 4</i></p> <p><b>BIAYA OPERASI LANGSUNG VARIABEL</b></p> <p>1. BIAYA PELUMASAN</p> <p>a. Pemakaian pelumas per jam terbang</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sebutkan berapa liter kebutuhan (oil consumption) per jam berdasarkan data teknis.</li> </ul>								

No.	KOMPONEN BIAYA JASA ANGKUTAN UDARA										
	<p>b. Harga rata-rata Pelumas per liter (jika lebih dari satu jenis Pelumas, maka digunakan harga tertimbang) <math display="block">\frac{\text{harga jenis 1} + \text{harga jenis 2} + \dots + \text{harga jenis ke N}}{\text{jumlah jenis pelumas (N)}}</math></p> <p>c. BIAAYA PELUMAS PER PENUMPANG-KM <math display="block">\frac{a. X b. X \text{ jam terbang per tahun}}{\text{produksi pnp-km tahun}}</math></p> <p><b>2. BIAAYA BAHAN BAKAR MINYAK</b></p> <p>a. Pemakaian Avtur/Avgas per jam terbang sebutkan berapa liter kebutuhan avtur/avgas (fuel consumption) per jam berdasarkan data teknis</p> <p>b. Harga rata-rata Avtur/Avgas per liter (harga Avtur/Avgas yang ditetapkan Pemerintah)</p> <p>c. BIAAYA BAHAN BAKAR MINYAK PER PENUMPANG-Km <math display="block">\frac{a. X b. X \text{ jam terbang per tahun}}{\text{produksi pnp-km tahun}}</math></p> <p><b>3. BIAAYA TUNJANGAN CREW</b></p> <p>a. Komposisi Crew pesawat :</p> <table border="0" data-bbox="435 1134 1130 1258"> <tr> <td>- Pilot</td> <td>orang</td> </tr> <tr> <td>- Co Pilot</td> <td>orang</td> </tr> <tr> <td>- Cabin Crew</td> <td>orang</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><hr/></td> </tr> <tr> <td>Jumlah</td> <td>orang</td> </tr> </table> <p>b. Biaya tunjangan crew per tahun</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Travel Allowance</li> <li>- Production Allowance</li> <li>- Hotel Accomodation</li> <li>- Hotel</li> <li>- Airport Transportation</li> <li>- Stand by Allowance</li> <li>- Crew Meals</li> </ul> <p>Jumlah</p> <p>c. BIAAYA TUNJANGAN CREW PER PENUMPANG-KM <math display="block">\frac{\text{biaya tunjangan crew per tahun}}{\text{produksi pnp-km tahun}}</math></p> <p><b>4. BIAAYA OVERHAUL / PEMELIHARAAN</b></p> <p>a. Overhaul Engine (.... unit) (untuk pesawat tersebut berapa unit engine yang digunakan)</p>	- Pilot	orang	- Co Pilot	orang	- Cabin Crew	orang	<hr/>		Jumlah	orang
- Pilot	orang										
- Co Pilot	orang										
- Cabin Crew	orang										
<hr/>											
Jumlah	orang										

No.	KOMPONEN BIAYA JASA ANGKUTAN UDARA
	<p>1) TBO (Time Between Overhaul) <i>(selang waktu overhaul engine dalam jam)</i></p> <p>2) Biaya Overhaul Engine per TBO (...unit) - dalam US\$. - dalam rupiah</p> <p>3) BIAYA OVERHAUL ENGINE PER-KM <u><i>Biaya overhaul TBO per tahun</i></u> <i>produksi pnp-km per tahun</i></p> <p>b. Overhaul Propeller (.....unit) <i>(untuk pesawat tersebut berapa unit propeller yang digunakan)</i> <i>catatan : khusus pesawat piston atau turbo jet</i></p> <p>1) TBO (Time Between Overhaul) <i>(selang waktu overhaul engine dalam jam)</i></p> <p>2) Biaya Overhaul Propeller per TBO (...unit) - dalam US\$. - dalam rupiah</p> <p>3) BIAYA OVERHAUL PROPELLER PER JAM <u><i>Biaya overhaul TBO per tahun</i></u> <i>produksi pnp-km per tahun</i></p> <p>c. Overhaul Airframe</p> <p>1) TBO (Time Between Overhaul) <i>(selang waktu overhaul airframe dalam jam)</i></p> <p>2) Biaya Overhaul /airframe per TBO - dalam US\$. - dalam rupiah</p> <p>3) BIAYA OVERHAUL AIRFRAME PER JAM <u><i>biaya overhaul TBO per tahun</i></u> <i>produksi pnp-km per tahun</i></p> <p>d. TOTAL BIAYA OVERHAUL / PEMELIHARAAN PER PENUMPANG-KM Untuk pesawat piston atau turbo jet = a.3) + b. 3) + c. 3) Untuk pesawat jet = a.3) + c.3)</p> <p>5. BIAYA JASA KEBANDARUDARAAN</p> <p>a. Jasa Pendaratan</p> <p>1) Jumlah pendaratan per tahun <i>(jumlah pendaratan sesuai dengan jumlah frekwensi penerbangan per tahun)</i></p>

No.	KOMPONEN BIAYA JASA ANGKUTAN UDARA
	<p>2) Biaya pendaratan per tahun (MTOW X tarif pendaratan per ton X jumlah pendaratan per tahun)</p> <p>3) BIAYA PENDARATAN PER PENUMPANG-KM <i>biaya pendaratan per tahun</i> <i>produksi pnp-km per tahun</i></p> <p>b. Jasa Penempatan</p> <p>1) Jumlah penempatan pesawat per tahun (jumlah penempatan pesawat sesuai dengan jumlah frekwensi penerbangan per tahun)</p> <p>2) Biaya jasa penempatan pesawat per tahun (MTOW X tarif jasa penempatan per ton X jumlah penempatan pesawat per tahun)</p> <p>3) BIAYA JASA PENEMPATAN PESAWAT PER PENUMPANG-KM <i>biaya jasa penempatan pesawat per tahun</i> <i>produksi pnp-km per tahun</i></p> <p>c. TOTAL BIAYA JASA KEBANDARUDARAAN PER PENUMPANG-KM a. 3) + b. 3)</p> <p>6. BIAYA JASA PELAYANAN NAVIGASI PENERBANGAN</p> <p>1) Jumlah route unit per tahun (jumlah route unit sesuai dengan jumlah frekwensi penerbangan per tahun, faktor jarak penerbangan dan faktor berat pesawat) atau dengan rumus : (Faktor Jarak X Faktor Berat X jumlah frekwensi per tahun)</p> <p>2) Biaya jasa pelayanan navigasi penerbangan per tahun (Jumlah Route Unit per tahun X Tarif per Route Unit)</p> <p>3) BIAYA JASA PELAYANAN NAVIGASI PENERBANGAN PER PENUMPANG-KM <i>biaya pelayanan navigasi penerbangan per tahun</i> <i>produksi pnp-km per tahun</i></p> <p>7. BIAYA JASA GROUND HANDLING PENERBANGAN</p> <p>a. Biaya Ground Handling per tahun, (jumlah pendaratan per tahun X tarif ground handling)</p> <p>b. Biaya Jasa Ground Handling Lainnya per tahun (jumlah pendaratan per tahun X tarif jasa ground handling lainnya)</p> <p>c. TOTAL BIAYA GROUND HANDLING PER PENUMPANG-KM <u>a. + b.</u> produksi pnp-km per tahun</p>

No.	KOMPONEN BIAYA JASA ANGKUTAN UDARA
	<p>8. BIAYA CATERING PENERBANGAN</p> <p>a. Biaya Catering per tahun Biaya catering yang digunakan untuk penerbangan (jumlah penumpang per pesawat per tahun X biaya catering per penumpang)</p> <p>b. TOTAL BIAYA CATERING PER PENUMPANG-KM <math display="block">\frac{\text{biaya catering per tahun}}{\text{produksi pnp-km per tahun}}</math></p> <p>9. TOTAL BIAYA OPERASI LANGSUNG VARIABLE Total biaya : 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8</p> <p>TOTAL BIAYA OPERASI LANGSUNG Total biaya : A + B</p>
II.	<p>BIAYA OPERASI TIDAK LANGSUNG</p> <p>1. BIAYA ORGANISASI</p> <p>a. Biaya pegawai non crew (biaya pegawai non crew untuk penerbangan per tahun)</p> <p>b. Biaya Umum (biaya umum penunjang aktivitas produksi untuk penerbangan per tahun)</p> <p>c. BIAYA ORGANISASI PER PENUMPANG-KM <math display="block">\frac{a. + b.}{\text{produksi pnp-km per tahun}}</math></p> <p>2. BIAYA PEMASARAN/PENJUALAN</p> <p>a. Komisi Agen (komisi agen untuk penerbangan per tahun), yaitu : (jumlah penumpang per pesawat per tahun X tarif penumpang X ...% komisi agen)</p> <p>b. Dokumen Angkutan pembuatan dokumen angkutan untuk penerbangan per tahun (jumlah penumpang) per pesawat per tahun X biaya per dokumen)</p> <p>c. BIAYA PEMASARAN/PENJUALAN PER PENUMPANG-KM <math display="block">\frac{a. + b.}{\text{produksi pnp-km per tahun}}</math></p>

No.	KOMPONEN BIAYA JASA ANGKUTAN UDARA
III.	<p>TOTAL BIAYA OPERASI TIDAK LANGSUNG</p> <p style="text-align: center;">Total biaya = 1 + 2</p> <p>TOTAL BIAYA OPERASI PER PENUMPANG-KM</p> <p style="text-align: center;">Total biaya operasi langsung + Total biaya operasi tidak langsung</p>

MENTERI PERHUBUNGAN,

ttd

FREDDY NUMBERI

SALINAN sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN



UMAR ARIS, SH, MM, MH  
Pembina Tk.I (IV/b)  
NIP. 19630220 198903 1 001

**TARIF PELAYANAN PENUMPANG KELAS EKONOMI ANGKUTAN UDARA NIAGA  
 BERJADWAL DALAM NEGERI DENGAN PESAWAT JET**

NO.	RUTE	JARAK (KM)	TARIF PENUMPANG
1	AMAHAI - LANGGUR	565	Rp 1,074,000
2	AMBON - BIAK	934	Rp 1,326,000
3	AMBON - DENPASAR	1,585	Rp 1,886,000
4	AMBON - DOBO	708	Rp 1,196,000
5	AMBON - FAKFAK	461	Rp 876,000
6	AMBON - JAKARTA	2,533	Rp 3,014,000
7	AMBON - JAYAPURA	1,447	Rp 1,845,000
8	AMBON - KAIMANA	617	Rp 1,132,000
9	AMBON - KENDARI	705	Rp 1,196,000
10	AMBON - LABUHA	356	Rp 737,000
11	AMBON - LANGGUR	591	Rp 1,123,000
12	AMBON - MAKASSAR	1,016	Rp 1,440,000
13	AMBON - MANADO	782	Rp 1,212,000
14	AMBON - MANGOLE	356	Rp 737,000
15	AMBON - MANOKWARI	806	Rp 1,249,000
16	AMBON - NABIRE	830	Rp 1,281,000
17	AMBON - PALU	1,039	Rp 1,440,000
18	AMBON - SANANA	301	Rp 624,000
19	AMBON - SAUMLAKI	593	Rp 1,127,000
20	AMBON - SORONG	480	Rp 912,000
21	AMBON - SURABAYA	1,750	Rp 2,083,000
22	AMBON - TALIABU	457	Rp 868,000
23	AMBON - TERNATE	536	Rp 1,018,000
24	AMBON - TIMIKA	1,047	Rp 1,440,000
25	BAJAWA - KUPANG	335	Rp 693,000
26	BALIKPAPAN - BANJARMASIN	349	Rp 722,000
27	BALIKPAPAN - BATAM	1,445	Rp 1,844,000
28	BALIKPAPAN - BERAU	407	Rp 814,000
29	BALIKPAPAN - DENPASAR	853	Rp 1,281,000
30	BALIKPAPAN - GORONTALO	691	Rp 1,196,000
31	BALIKPAPAN - JAKARTA	1,312	Rp 1,797,000
32	BALIKPAPAN - MAKASSAR	515	Rp 979,000
33	BALIKPAPAN - MANADO	982	Rp 1,394,000
34	BALIKPAPAN - MATARAM	891	Rp 1,283,000

35	BALIKPAPAN	- PALANGKARAYA	371	Rp	768,000
36	BALIKPAPAN	- PALU	364	Rp	753,000
37	BALIKPAPAN	- PANGKALANBUN	634	Rp	1,135,000
38	BALIKPAPAN	- PONTIANAK	842	Rp	1,281,000
39	BALIKPAPAN	- SEMARANG	965	Rp	1,370,000
40	BALIKPAPAN	- SURABAYA	866	Rp	1,283,000
41	BALIKPAPAN	- TARAKAN	530	Rp	1,007,000
42	BALIKPAPAN	- YOGYAKARTA	1,145	Rp	1,569,000
43	BANDA ACEH	- BATAM	1,081	Rp	1,481,000
44	BANDA ACEH	- JAKARTA	2,010	Rp	2,392,000
45	BANDA ACEH	- MEDAN	498	Rp	946,000
46	BANDANAERA	- LANGGUR	343	Rp	710,000
47	BANDAR LAMPUNG	- PALEMBANG	374	Rp	775,000
48	BANDAR LAMPUNG	- TANJUNG PANDAN	411	Rp	822,000
49	BANDUNG	- BATAM	1,129	Rp	1,546,000
50	BANDUNG	- DENPASAR	891	Rp	1,283,000
51	BANDUNG	- JAMBI	774	Rp	1,200,000
52	BANDUNG	- MEDAN	1,610	Rp	1,916,000
53	BANDUNG	- PADANG	1,094	Rp	1,499,000
54	BANDUNG	- PALANGKARAYA	1,011	Rp	1,436,000
55	BANDUNG	- PALEMBANG	615	Rp	1,132,000
56	BANDUNG	- PANGKAL PINANG	665	Rp	1,190,000
57	BANDUNG	- PANGKALAN BUN	789	Rp	1,223,000
58	BANDUNG	- PEKANBARU	1,178	Rp	1,614,000
59	BANDUNG	- SEMARANG	328	Rp	679,000
60	BANDUNG	- SOLO	445	Rp	855,000
61	BANDUNG	- SURABAYA	706	Rp	1,196,000
62	BANDUNG	- TANJUNG PANDAN	623	Rp	1,133,000
63	BANDUNG	- YOGYAKARTA	393	Rp	786,000
64	BANJARMASIN	- JAKARTA	995	Rp	1,413,000
65	BANJARMASIN	- MAKASSAR	625	Rp	1,134,000
66	BANJARMASIN	- MANADO	1,309	Rp	1,793,000
67	BANJARMASIN	- PALU	680	Rp	1,195,000
68	BANJARMASIN	- PANGKALAN BUN	348	Rp	720,000
69	BANJARMASIN	- SEMARANG	624	Rp	1,134,000
70	BANJARMASIN	- SURABAYA	531	Rp	1,009,000
71	BANJARMASIN	- TARAKAN	856	Rp	1,282,000
72	BANJARMASIN	- YOGYAKARTA	830	Rp	1,281,000
73	BATAM	- DENPASAR	1,649	Rp	1,962,000
74	BATAM	- DUMAI	309	Rp	640,000
75	BATAM	- JAKARTA	914	Rp	1,298,000
76	BATAM	- JAMBI	402	Rp	804,000
77	BATAM	- MATAK	363	Rp	751,000



78	BATAM	- MEDAN	684	Rp	1,195,000
79	BATAM	- NATUNA	676	Rp	1,195,000
80	BATAM	- PADANG	473	Rp	899,000
81	BATAM	- PALEMBANG	467	Rp	887,000
82	BATAM	- PANGKAL PINANG	451	Rp	857,000
83	BATAM	- PEKANBARU	326	Rp	675,000
84	BATAM	- PONTIANAK	643	Rp	1,151,000
85	BATAM	- TANJUNG PANDAN	513	Rp	975,000
86	BENGGULU	- JAKARTA	594	Rp	1,129,000
87	BENGGULU	- PALEMBANG	319	Rp	660,000
88	BIAK	- BINTUNI	319	Rp	660,000
89	BIAK	- DENPASAR	2,483	Rp	2,955,000
90	BIAK	- ENAROTALI	372	Rp	770,000
91	BIAK	- FAKFAK	664	Rp	1,189,000
92	BIAK	- JAKARTA	3,812	Rp	4,536,000
93	BIAK	- JAYAPURA	535	Rp	1,017,000
94	BIAK	- KAIMANA	400	Rp	800,000
95	BIAK	- KOKONAU	591	Rp	1,123,000
96	BIAK	- LANGGUR	624	Rp	1,134,000
97	BIAK	- MAKASSAR	1,945	Rp	2,315,000
98	BIAK	- MANADO	1,275	Rp	1,747,000
99	BIAK	- SARMI	304	Rp	629,000
100	BIAK	- SORONG	568	Rp	1,079,000
101	BIAK	- TIMIKA	379	Rp	778,000
102	BIAK	- WAMENA	491	Rp	933,000
103	BIMA	- DENPASAR	391	Rp	782,000
104	BIMA	- ENDE	344	Rp	712,000
105	BIMA	- KUPANG	576	Rp	1,094,000
106	BIMA	- MAKASSAR	504	Rp	958,000
107	BIMA	- MATARAM	315	Rp	652,000
108	BIMA	- MAUMERE	391	Rp	782,000
109	BINTUNI	SORONG	332	Rp	687,000
110	BULI	- SANANA	430	Rp	853,000
111	BUOL	- PALU	367	Rp	760,000
112	BUTON	- MAKASSAR	406	Rp	812,000
113	CILACAP	- JAKARTA	391	Rp	782,000
114	DENPASAR	- JAKARTA	1,079	Rp	1,478,000
115	DENPASAR	- JAYAPURA	2,398	Rp	2,854,000
116	DENPASAR	- KENDARI	1,042	Rp	1,440,000
117	DENPASAR	- KUPANG	974	Rp	1,383,000
118	DENPASAR	- LABUANBAJO	580	Rp	1,102,000
119	DENPASAR	- MAKASSAR	671	Rp	1,195,000
120	DENPASAR	- MANADO	1,614	Rp	1,921,000

121	DENPASAR	- MAUMERE	793	Rp	1,229,000
122	DENPASAR	- MEDAN	2,357	Rp	2,805,000
123	DENPASAR	- RUTENG	590	Rp	1,121,000
124	DENPASAR	- SEMARANG	578	Rp	1,098,000
125	DENPASAR	- SOLO	567	Rp	1,077,000
126	DENPASAR	- SORONG	1,805	Rp	2,148,000
127	DENPASAR	- SURABAYA	360	Rp	745,000
128	DENPASAR	- TAMBOLAKA	517	Rp	982,000
129	DENPASAR	- TIMIKA	2,862	Rp	3,406,000
130	DENPASAR	- WAINGAPU	580	Rp	1,102,000
131	DENPASAR	- YOGYAKARTA	658	Rp	1,178,000
132	DUMAI	- JAKARTA	1,091	Rp	1,495,000
133	DUMAI	- MEDAN	382	Rp	780,000
134	DUMAI	- PALEMBANG	770	Rp	1,197,000
135	DUMAI	- SINGKEP	419	Rp	838,000
136	ENDE	- DENPASAR	713	Rp	1,197,000
137	EWER	- MERAUKE	445	Rp	855,000
138	FAKFAK	- MANOKWARI	315	Rp	652,000
139	GORONTALO	- MAKASSAR	900	Rp	1,284,000
140	GORONTALO	- PALU	411	Rp	822,000
141	GUNUNG SITOLI	- PADANG	407	Rp	814,000
142	HALIM	- PALANGKARAYA	1,012	Rp	1,437,000
143	HALIM	- PANGKALAN BUN	790	Rp	1,225,000
144	JAKARTA	- JAMBI	667	Rp	1,194,000
145	JAKARTA	- JAYAPURA	4,414	Rp	5,253,000
146	JAKARTA	- KENDARI	1,750	Rp	2,083,000
147	JAKARTA	- KETAPANG	622	Rp	1,133,000
148	JAKARTA	- KUPANG	2,205	Rp	2,624,000
149	JAKARTA	- MAKASSAR	1,476	Rp	1,846,000
150	JAKARTA	- MALANG	780	Rp	1,209,000
151	JAKARTA	- MANADO	2,529	Rp	3,010,000
152	JAKARTA	- MATAK	1,062	Rp	1,455,000
153	JAKARTA	- MATARAM	1,051	Rp	1,440,000
154	JAKARTA	- MEDAN	1,495	Rp	1,847,000
155	JAKARTA	- PADANG	1,010	Rp	1,434,000
156	JAKARTA	- PALANGKARAYA	957	Rp	1,359,000
157	JAKARTA	- PALEMBANG	509	Rp	967,000
158	JAKARTA	- PALU	1,871	Rp	2,226,000
159	JAKARTA	- PANGKAL PINANG	504	Rp	958,000
160	JAKARTA	- PANGKALAN BUN	649	Rp	1,162,000
161	JAKARTA	- PEKANBARU	1,015	Rp	1,440,000
162	JAKARTA	- PONTIANAK	789	Rp	1,223,000
163	JAKARTA	- SEMARANG	473	Rp	898,000

164	JAKARTA	- SOLO	547	Rp	1,039,000
165	JAKARTA	- SORONG	2,843	Rp	3,383,000
166	JAKARTA	- SURABAYA	778	Rp	1,206,000
167	JAKARTA	- TANJUNG PANDAN	456	Rp	866,000
168	JAKARTA	- TANJUNG PINANG	868	Rp	1,283,000
169	JAKARTA	- TARAKAN	1,765	Rp	2,100,000
170	JAKARTA	TERNATE	2,704	Rp	3,218,000
171	JAKARTA	- TIMIKA	3,729	Rp	4,438,000
172	JAKARTA	- YOGYAKARTA	509	Rp	967,000
173	JAMBI	- MEDAN	832	Rp	1,281,000
174	JAMBI	- TANJUNG PINANG	352	Rp	729,000
175	JAMBI	- PEKANBARU	328	Rp	679,000
176	JAYAPURA	- KAIMANA	854	Rp	1,282,000
177	JAYAPURA	- MAKASSAR	2,358	Rp	2,806,000
178	JAYAPURA	- MANOKWARI	794	Rp	1,231,000
179	JAYAPURA	- MERAUKE	678	Rp	1,195,000
180	JAYAPURA	- MULIA	312	Rp	646,000
181	JAYAPURA	- NABIRE	555	Rp	1,055,000
182	JAYAPURA	- SORONG	1,071	Rp	1,467,000
183	JAYAPURA	TANAH MERAH	397	Rp	794,000
184	JAYAPURA	- TIMIKA	515	Rp	979,000
185	KAIMANA	- MANOKWARI	309	Rp	640,000
186	KAIMANA	- SORONG	369	Rp	764,000
187	KAIMANA	- TIMIKA	369	Rp	764,000
188	KAO	- MANADO	371	Rp	768,000
189	KENDARI	- LUWUK	357	Rp	739,000
190	KENDARI	- MAKASSAR	361	Rp	747,000
191	KENDARI	- MANADO	826	Rp	1,280,000
192	KENDARI	- NAMLEA	537	Rp	1,020,000
193	KENDARI	- PALU	573	Rp	1,089,000
194	KENDARI	- SORONG	1,065	Rp	1,459,000
195	KENDARI	- SURABAYA	1,132	Rp	1,551,000
196	KERINCI	- JAMBI	351	Rp	727,000
197	KETAPANG	- SEMARANG	711	Rp	1,197,000
198	KOTABARU	- SURABAYA	595	Rp	1,131,000
199	KUPANG	- LABUANBAJO	397	Rp	794,000
200	KUPANG	- MAKASSAR	775	Rp	1,201,000
201	KUPANG	- MATARAM	904	Rp	1,284,000
202	KUPANG	- RUTENG	424	Rp	848,000
203	KUPANG	- SURABAYA	1,250	Rp	1,713,000
204	KUPANG	- TAMBOLAKA	496	Rp	942,000
205	KUPANG	- WAINGAPU	374	Rp	774,000
206	LABUAN BAJO	- MAKASSAR	484	Rp	920,000

207	LANGGUR	- SAUMLAKI	580	Rp	1,102,000
208	LANGGUR	- TIMIKA	477	Rp	906,000
209	LUWUK	- MAKASSAR	617	Rp	1,132,000
210	LUWUK	- MANADO	404	Rp	808,000
211	LUWUK	- MANGOLE	319	Rp	660,000
212	LUWUK	- NAMLEA	544	Rp	1,034,000
213	LUWUK	- PALU	333	Rp	689,000
214	MAKASSAR	- BAU-BAU	338	Rp	700,000
215	MAKASSAR	- MANOKWARI	1,674	Rp	1,992,000
216	MAKASSAR	- TERNATE	1,088	Rp	1,491,000
217	MAKASSAR	- TIMIKA	2,151	Rp	2,560,000
218	MAKASSAR	- YOGYAKARTA	1,051	Rp	1,440,000
219	MALANG	- BALIKPAPAN	1,012	Rp	1,437,000
220	MALANG	- BANJARMASIN	654	Rp	1,171,000
221	MALANG	- DENPASAR	345	Rp	714,000
222	MANADO	BULI	747	Rp	1,197,000
223	MANADO	- BULU	404	Rp	808,000
224	MANADO	- JAYAPURA	1,857	Rp	2,210,000
225	MANADO	- MAKASSAR	959	Rp	1,362,000
226	MANADO	- MANGOLE	404	Rp	808,000
227	MANADO	- MELONGGUANE	355	Rp	735,000
228	MANADO	- PALU	658	Rp	1,178,000
229	MANADO	- POSO	700	Rp	1,196,000
230	MANADO	- SORONG	758	Rp	1,197,000
231	MANADO	- SURABAYA	1,672	Rp	1,990,000
232	MANADO	- TALIABU	361	Rp	747,000
233	MANADO	- TERNATE	315	Rp	652,000
234	MANADO	- TIMIKA	1,553	Rp	1,848,000
235	MANADO	- WEDA	371	Rp	768,000
236	MANGOLE	- TERNATE	357	Rp	739,000
237	MANOKWARI	- NABIRE	346	Rp	716,000
238	MANOKWARI	- SORONG	354	Rp	733,000
239	MANOKWARI	- TIMIKA	552	Rp	1,049,000
240	MATAK	- PANGKAL PINANG	582	Rp	1,106,000
241	MATARAM	- MAKASSAR	603	Rp	1,132,000
242	MATARAM	- MAUMERE	701	Rp	1,196,000
243	MATARAM	- SURABAYA	410	Rp	820,000
244	MATARAM	- WAINGAPU	413	Rp	826,000
245	MATARAM	- YOGYAKARTA	594	Rp	1,129,000
246	MAUMERE	- MAKASSAR	502	Rp	954,000
247	MAUMERE	- TAMBOLAKA	346	Rp	716,000
248	MEDAN	- PADANG	543	Rp	1,032,000
249	MEDAN	- PALEMBANG	1,004	Rp	1,426,000

250	MEDAN	- PEKANBARU	497	Rp	944,000
251	MEDAN	- PONTIANAK	1,346	Rp	1,841,000
252	MEDAN	- SANANA	408	Rp	816,000
253	MEDAN	- SURABAYA	1,990	Rp	2,368,000
254	MERAUKE	- NABIRE	818	Rp	1,268,000
255	MERAUKE	- SENGGO	380	Rp	779,000
256	MERAUKE	- TIMIKA	623	Rp	1,133,000
257	MERAUKE	- WAMENA	519	Rp	986,000
258	NANGAPINOH	- PONTIANAK	341	Rp	706,000
259	PADANG	- BENGKULU	439	Rp	854,000
260	PADANG	- JAMBI	423	Rp	846,000
261	PADANG	- PALEMBANG	564	Rp	1,072,000
262	PALEMBANG	- PEKANBARU	555	Rp	1,055,000
263	PALEMBANG	- TANJUNG PANDAN	382	Rp	780,000
264	PALEMBANG	- TANJUNG PINANG	378	Rp	776,000
265	PALU	- MAKASSAR	578	Rp	1,098,000
266	PALU	- SORONG	1,252	Rp	1,715,000
267	PALU	- SURABAYA	1,252	Rp	1,715,000
268	PALU	- TOLI-TOLI	309	Rp	641,000
269	PANGKAL PINANG	- PONTIANAK	474	Rp	901,000
270	PANGKAL PINANG	- TANJUNG PINANG	334	Rp	691,000
271	PANGKALAN BUN	- SEMARANG	496	Rp	942,000
272	PANGKALAN BUN	- SURABAYA	552	Rp	1,049,000
273	PEKANBARU	- SINGKEP	494	Rp	939,000
274	PEKANBARU	- TANJUNG PINANG	375	Rp	776,000
275	POMALA	- MAKASSAR	313	Rp	648,000
276	PONTIANAK	- BANJARMASIN	708	Rp	1,196,000
277	PONTIANAK	- PALEMBANG	1,298	Rp	1,778,000
278	PONTIANAK	- PANGKALAN BUN	426	Rp	852,000
279	PONTIANAK	- PUTUSIBAU	417	Rp	834,000
280	PONTIANAK	- TANJUNG PANDAN	343	Rp	710,000
281	PONTIANAK	- YOGYAKARTA	857	Rp	1,282,000
282	POSO	- BALIKPAPAN	547	Rp	1,039,000
283	POSO	GORONTALO	324	Rp	671,000
284	POSO	- MAKASSAR	552	Rp	1,049,000
285	PUTUSIBAU	- BALIKPAPAN	547	Rp	1,039,000
286	RAHAMUNA	- MAKASSAR	333	Rp	689,000
287	ROTE	- WAINGAPU	352	Rp	729,000
288	SAMARINDA	- TANJUNG SELOR	341	Rp	706,000
289	SAMARINDA	- TARAKAN	422	Rp	844,000
290	SAMPIT	- JAKARTA	830	Rp	1,281,000
291	SAMPIT	- SURABAYA	544	Rp	1,034,000
292	SANANA	- TERNATE	363	Rp	751,000

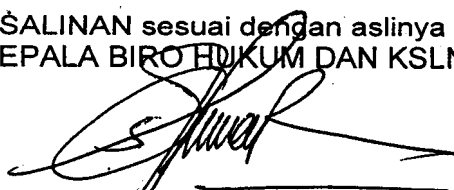
293	SEMARANG	- BATAM	1,203	Rp	1,648,000
294	SEMARANG	- SURABAYA	311	Rp	644,000
295	SINGKEP	- TANJUNG PANDAN	383	Rp	780,000
296	SOLO	- MAKASSAR	1,012	Rp	1,437,000
297	SORONG	- MAKASSAR	1,035	Rp	1,440,000
298	SORONG	- SURABAYA	2,222	Rp	2,644,000
299	SORONG	- TERNATE	983	Rp	1,396,000
300	SORONG	- TIMIKA	822	Rp	1,274,000
301	SUMBAWA	- SURABAYA	571	Rp	1,085,000
302	SURABAYA	- BATAM	1,371	Rp	1,843,000
303	SURABAYA	- BIAK	2,715	Rp	3,231,000
304	SURABAYA	- JAYAPURA	3,223	Rp	3,835,000
305	SURABAYA	- KUALA PEMBUANG	467	Rp	887,000
306	SURABAYA	- MAKASSAR	830	Rp	1,281,000
307	SURABAYA	- PALANGKARAYA	663	Rp	1,187,000
308	SURABAYA	- PONTIANAK	1,023	Rp	1,440,000
309	SURABAYA	- TARAKAN	1,352	Rp	1,842,000
310	SURABAYA	- TIMIKA	3,225	Rp	3,838,000
311	SURABAYA	- YOGYAKARTA	402	Rp	804,000
312	TALIABU	- TERNATE	469	Rp	891,000
313	TANJUNG KARANG	- BENGKULU	376	Rp	776,000
314	TANJUNG PINANG	- MATAK	371	Rp	768,000
315	TANJUNG PINANG	- NATUNA	593	Rp	1,127,000
316	TANJUNG SANTAN	- TARAKAN	378	Rp	776,000
317	TARAKAN	- TOLI-TOLI	444	Rp	854,000
318	TIMIKA	- WAMENA	320	Rp	662,000
319	YOGYAKARYA	- BATAM	1,343	Rp	1,840,000

MENTERI PERHUBUNGAN,

ttd

FREDDY NUMBERI

SALINAN sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN



UMAR ARIS, SH, MM, MH

Pembina Tk.I (IV/b)

NIP. 19630220 198903 1 001

**TARIF PELAYANAN PENUMPANG KELAS EKONOMI ANGKUTAN UDARA NIAGA  
BERJADWAL DALAM NEGERI DENGAN PESAWAT PROPELLER**

NO.	RUTE	JARAK (KM)	TARIF PENUMPANG
1	ALOR - KISAR	293	Rp 826,000
2	ALOR - KUPANG	241	Rp 680,000
3	ALOR - MAUMERE	278	Rp 784,000
4	AMAHAI - LANGGUR	564	Rp 1,376,000
5	AMBON - AMAHAI	102	Rp 353,000
6	AMBON - BULA	278	Rp 784,000
7	AMBON - FAKFAK	461	Rp 1,179,000
8	AMBON - LABUHA	354	Rp 981,000
9	AMBON - LANGGUR	593	Rp 1,447,000
10	AMBON - MANGOLE	356	Rp 986,000
11	AMBON - NAMLEA	130	Rp 416,000
12	AMBON - SANANA	298	Rp 835,000
13	AMBON - SAUMLAKI	594	Rp 1,449,000
14	AMBON - SORONG	477	Rp 1,180,000
15	AMBON - TALIABU	456	Rp 1,179,000
16	AMBON - TERNATE	535	Rp 1,305,000
17	BADE - KEPI	83	Rp 266,000
18	BADE - MERAUKE	174	Rp 536,000
19	BAJAWA - ENDE	128	Rp 410,000
20	BAJAWA - KUPANG	334	Rp 925,000
21	BAJAWA - RUTENG	63	Rp 202,000
22	BALIKPAPAN - BANJARMASIN	348	Rp 964,000
23	BALIKPAPAN - BERAU	406	Rp 1,076,000
24	BALIKPAPAN - KOTA BARU	241	Rp 680,000
25	BALIKPAPAN - MAKASSAR	513	Rp 1,252,000
26	BALIKPAPAN - MELAK	126	Rp 403,000
27	BALIKPAPAN - PALANGKARAYA	369	Rp 1,022,000
28	BALIKPAPAN - PALU	363	Rp 1,006,000
29	BALIKPAPAN - SAMARINDA	110	Rp 352,000
30	BALIKPAPAN - TANJUNG WARUKIN	194	Rp 598,000
31	BALIKPAPAN - TARAkan	519	Rp 1,266,000

32	BANDA ACEH	- LHOK SEUMAWE	193	Rp 594,000
33	BANDA ACEH	- MEDAN	497	Rp 1,213,000
34	BANDA ACEH	- MEULABOH	191	Rp 588,000
35	BANDA ACEH	- TAPAK TUAN	244	Rp 688,000
36	BANDANAERA	- LANGGUR	341	Rp 945,000
37	BANDAR LAMPUNG	- JAKARTA	235	Rp 663,000
38	BANDAR LAMPUNG	- PALEMBANG	374	Rp 1,036,000
39	BANDAR LAMPUNG	- TANJUNG PANDAN	410	Rp 1,087,000
40	BANDUNG	- JAKARTA	163	Rp 502,000
41	BANDUNG	NUSAWIRU	222	Rp 635,000
42	BANDUNG	- SEMARANG	326	Rp 903,000
43	BANDUNG	- SOLO	444	Rp 1,177,000
44	BANDUNG	- YOGYAKARTA	391	Rp 1,041,000
45	BANJARMASIN	- BATU LICIN	133	Rp 426,000
46	BANJARMASIN	- KOTA BARU	157	Rp 484,000
47	BANJARMASIN	- KUALA PEMBUANG	246	Rp 694,000
48	BANJARMASIN	- MUARA TEWE	276	Rp 778,000
49	BANJARMASIN	- PALANGKARAYA	176	Rp 542,000
50	BANJARMASIN	- PANGKALAN BUN	346	Rp 958,000
51	BANJARMASIN	- SAMPIT	224	Rp 636,000
52	BANJARMASIN	- SURABAYA	530	Rp 1,293,000
53	BANJARMASIN	- TANJUNG WARUKIN	157	Rp 484,000
54	BATAM	- DUMAI	304	Rp 842,000
55	BATAM	- JAMBI	400	Rp 1,060,000
56	BATAM	- MATAK	361	Rp 1,000,000
57	BATAM	- PADANG	473	Rp 1,180,000
58	BATAM	- PALEMBANG	457	Rp 1,179,000
59	BATAM	- PANGKAL PINANG	445	Rp 1,179,000
60	BATAM	- PEKANBARU	320	Rp 886,000
61	BATAM	- RENGAT	240	Rp 677,000
62	BATAM	- SINGKEP	196	Rp 604,000
63	BATAM	- TANJUNG PANDAN	509	Rp 1,242,000
64	BATAM	- TANJUNG PINANG	67	Rp 214,000
65	BAU-BAU	MARANGGO	195	Rp 601,000
66	BENGGULU	- JAKARTA	598	Rp 1,459,000
67	BENGGULU	- PALEMBANG	315	Rp 873,000
68	BERAU	- SAMARINDA	294	Rp 829,000
69	BERAU	- TANJUNG SELOR	80	Rp 256,000
70	BERAU	- TARAKAN	131	Rp 419,000



71	BIAK	- BINTUNI	319	Rp 884,000
72	BIAK	- ENAROTALI	371	Rp 1,028,000
73	BIAK	- JAYAPURA	531	Rp 1,296,000
74	BIAK	- KAIMANA	397	Rp 1,052,000
75	BIAK	- KOKONAU	594	Rp 1,449,000
76	BIAK	- MANOKWARI	235	Rp 663,000
77	BIAK	- NABIRE	250	Rp 705,000
78	BIAK	- NUMFOOR	145	Rp 464,000
79	BIAK	- RANSIKI	219	Rp 634,000
80	BIAK	- SARMI	301	Rp 835,000
81	BIAK	- SERUI	83	Rp 266,000
82	BIAK	- SORONG	567	Rp 1,383,000
83	BIAK	- TIMIKA	378	Rp 1,039,000
84	BIAK	- WAMENA	484	Rp 1,181,000
85	BIMA	- BAJAWA	265	Rp 747,000
86	BIMA	- DENPASAR	383	Rp 1,040,000
87	BIMA	- ENDE	343	Rp 950,000
88	BIMA	- KUPANG	573	Rp 1,398,000
89	BIMA	- LABUHAN BAJO	130	Rp 416,000
90	BIMA	- MAKASSAR	502	Rp 1,225,000
91	BIMA	- MATARAM	313	Rp 867,000
92	BIMA	- MAUMERE	391	Rp 1,041,000
93	BIMA	- RUTENG	213	Rp 631,000
94	BIMA	- SUMBAWA	141	Rp 451,000
95	BIMA	- TAMBOLAKA	126	Rp 403,000
96	BIMA	- WAINGAPU	215	Rp 633,000
97	BINTUNI	- MANOKWARI	176	Rp 542,000
98	BINTUNI	- RANSIKI	100	Rp 320,000
99	BINTUNI	SORONG	332	Rp 920,000
100	BOKONDINI	- JAYAPURA	243	Rp 685,000
101	BULI	- SANANA	430	Rp 1,140,000
102	BUNTOK	- PONTIANAK	124	Rp 397,000
103	BUOL	GORONTALO	204	Rp 628,000
104	BUOL	- PALU	364	Rp 1,008,000
105	BUOL	- TOLI-TOLI	67	Rp 214,000
106	BUTON	- KENDARI	157	Rp 484,000
107	BUTON	- MAKASSAR	404	Rp 1,071,000
108	BUTON	- RAHA/MUNA	80	Rp 256,000
109	CILACAP	- BANDUNG	282	Rp 795,000

110	CILACAP	- JAKARTA	391	Rp 1,041,000
111	CIREBON	- JAKARTA	267	Rp 753,000
112	DENPASAR	- LABUANBAJO	578	Rp 1,410,000
113	DENPASAR	- MATARAM	130	Rp 416,000
114	DENPASAR	- RUTENG	586	Rp 1,430,000
115	DENPASAR	- SEMARANG	576	Rp 1,405,000
116	DENPASAR	- SOLO	565	Rp 1,379,000
117	DENPASAR	- SUMBAWA	249	Rp 702,000
118	DENPASAR	- SURABAYA	357	Rp 989,000
119	DENPASAR	- TAMBOLAKA	515	Rp 1,257,000
120	DENPASAR	- WAINGAPU	580	Rp 1,415,000
121	DUMAI	- MEDAN	382	Rp 1,040,000
122	DUMAI	- SINGKEP	417	Rp 1,105,000
123	ENAROTALI	- KOKONAU	87	Rp 278,000
124	ENDE	- KUPANG	263	Rp 742,000
125	ENDE	- LABUANBAJO	216	Rp 633,000
126	ENDE	- LARANTUKA	163	Rp 502,000
127	ENDE	- MAUMERE	74	Rp 237,000
128	ENDE	- RUTENG	154	Rp 474,000
129	ENDE	- SAWU	185	Rp 570,000
130	ENDE	- TAMBOLAKA	289	Rp 815,000
131	ENDE	- WAINGAPU	202	Rp 622,000
132	EWER	- MERAUKE	445	Rp 1,179,000
133	EWER	- TIMIKA	176	Rp 542,000
134	EWER	- WAMENA	194	Rp 598,000
135	FAKFAK	- KAIMANA	193	Rp 594,000
136	FAKFAK	- MANOKWARI	315	Rp 873,000
137	FAKFAK	- SORONG	250	Rp 705,000
138	FAKFAK	- TEMINABUAN	170	Rp 524,000
139	GALELA	- KAO	104	Rp 354,000
140	GALELA	- MANADO	248	Rp 699,000
141	GALELA	- MOROTAI	54	Rp 173,000
142	GALELA	- TERNATE	135	Rp 432,000
143	GEBE	- BULI	173	Rp 533,000
144	GEBE	- TERNATE	259	Rp 730,000
145	GORONTALO	- LUWUK	172	Rp 530,000
146	GORONTALO	- PALU	411	Rp 1,089,000
147	GUNUNG SITOLI	- MEDAN	278	Rp 784,000
148	GUNUNG SITOLI	- PADANG	407	Rp 1,079,000

149	HALIM	- SEMARANG	282	Rp 795,000
150	JAKARTA	- PALEMBANG	504	Rp 1,230,000
151	JAKARTA	- PANGKAL PINANG	504	Rp 1,230,000
152	JAKARTA	- SEMARANG	469	Rp 1,180,000
153	JAKARTA	- SOLO	544	Rp 1,327,000
154	JAKARTA	- TANJUNG PANDAN	451	Rp 1,179,000
155	JAKARTA	- YOGYAKARTA	509	Rp 1,242,000
156	JAMBI	- PALEMBANG	214	Rp 632,000
157	JAMBI	- RENGAT	204	Rp 628,000
158	JAMBI	- SINGKEP	163	Rp 502,000
159	JAMBI	- TANJUNG PINANG	351	Rp 972,000
160	JAMBI	- PEKANBARU	328	Rp 909,000
161	JAYAPURA	MULIA	311	Rp 862,000
162	JAYAPURA	- NABIRE	552	Rp 1,347,000
163	JAYAPURA	- SARMI	213	Rp 631,000
164	JAYAPURA	TANAH MERAH	397	Rp 1,052,000
165	JAYAPURA	- TIMIKA	515	Rp 1,257,000
166	JAYAPURA	- WAMENA	243	Rp 685,000
167	KAIMANA	LANGGUR	249	Rp 702,000
168	KAIMANA	- MANOKWARI	309	Rp 856,000
169	KAIMANA	- NABIRE	204	Rp 628,000
170	KAIMANA	- RANSIKI	244	Rp 688,000
171	KAIMANA	- SORONG	367	Rp 1,017,000
172	KAIMANA	- TIMIKA	369	Rp 1,022,000
173	KAIMANA	- WASIOR	137	Rp 438,000
174	KAMBUAYA	- SORONG	126	Rp 403,000
175	KAO	- MANADO	371	Rp 1,028,000
176	KAO	- TERNATE	130	Rp 416,000
177	KENDARI	BAU-BAU	154	Rp 474,000
178	KENDARI	- LUWUK	356	Rp 986,000
179	KENDARI	- MAKASSAR	360	Rp 997,000
180	KENDARI	- NAMLEA	536	Rp 1,308,000
181	KENDARI	- PALU	571	Rp 1,393,000
182	KENDARI	- POMALA	98	Rp 314,000
183	KENDARI	- RAHA	93	Rp 298,000
184	KEPI	- MERAUKE	179	Rp 551,000
185	KERINCI	JAMBI	349	Rp 967,000
186	KETAPANG	- PANGKALAN BUN	232	Rp 653,000
187	KETAPANG	- PONTIANAK	194	Rp 598,000

188	KOTABARU	SURABAYA	600	Rp 1,464,000
189	KUALA PEMBUANG	- PANGKALAN BUN	154	Rp 474,000
190	KUALA PEMBUANG	- SAMPIT	113	Rp 362,000
191	KUPANG	LABUANBAJO	393	Rp 1,041,000
192	KUPANG	LARANTUKA	250	Rp 705,000
193	KUPANG	- LEWOLEBA	204	Rp 628,000
194	KUPANG	- MAUMERE	248	Rp 699,000
195	KUPANG	- RUTENG	422	Rp 1,118,000
196	KUPANG	- TAMBOLAKA	494	Rp 1,205,000
197	KUPANG	- WAINGAPU	372	Rp 1,030,000
198	LABUAN BAJO	- MAKASSAR	480	Rp 1,180,000
199	LABUAN BAJO	- MAUMERE	263	Rp 742,000
200	LABUAN BAJO	- WAINGAPU	167	Rp 514,000
201	LABUHA	- MANGOLE	259	Rp 730,000
202	LABUHA	- SANANA	235	Rp 663,000
203	LABUHA	- TERNATE	167	Rp 514,000
204	LABUHAN BAJO	- RUTENG	74	Rp 238,000
205	LANGGUR	DOBO	166	Rp 511,000
206	LANGGUR	- SAUMLAKI	580	Rp 1,415,000
207	LANGGUR	TIMIKA	474	Rp 1,180,000
208	LARANTUKA	- LEWOLEBA	54	Rp 173,000
209	LARANTUKA	- MAUMERE	102	Rp 353,000
210	LARANTUKA	- RUTENG	296	Rp 835,000
211	LEWOLEBA	- ALOR	130	Rp 416,000
212	LHOK SEUMAWE	- MEDAN	269	Rp 759,000
213	LONG APUNG	- MALINAU	227	Rp 640,000
214	LONG BAWAN	- MALINAU	111	Rp 356,000
215	LUBUK LINGGAU	- PALEMBANG	207	Rp 629,000
216	LUWUK	- MANADO	402	Rp 1,066,000
217	LUWUK	- MANGOLE	319	Rp 884,000
218	LUWUK	- NAMLEA	543	Rp 1,325,000
219	LUWUK	- PALU	328	Rp 909,000
220	LUWUK	- POSO	296	Rp 835,000
221	LUWUK	- SOROAKO	233	Rp 657,000
222	LUWUK	- TALIABU	209	Rp 630,000
223	MAKASSAR	BAU-BAU	335	Rp 928,000
224	MALANG	- DENPASAR	345	Rp 956,000
225	MALANG	- SURABAYA	176	Rp 542,000
226	MALINAU	- TARAKAN	107	Rp 355,000

227	MAMUJU	- TANA TORAJA	107	Rp 355,000
228	MANADO	- BULU	404	Rp 1,071,000
229	MANADO	- GORONTALO	254	Rp 716,000
230	MANADO	- MANGOLE	404	Rp 1,071,000
231	MANADO	- MELONGGUANE	355	Rp 983,000
232	MANADO	- NAHA	248	Rp 699,000
233	MANADO	- TALIABU	361	Rp 1,000,000
234	MANADO	- TERNATE	315	Rp 873,000
235	MANADO	- WEDA	371	Rp 1,028,000
236	MANGOLE	- NAMLEA	246	Rp 694,000
237	MANGOLE	- SANANA	65	Rp 208,000
238	MANGOLE	- TALIABU	148	Rp 474,000
239	MANGOLE	- TERNATE	357	Rp 989,000
240	MANOKWARI	- BABO	213	Rp 631,000
241	MANOKWARI	- NABIRE	344	Rp 953,000
242	MANOKWARI	- NUMFOOR	107	Rp 355,000
243	MANOKWARI	- SORONG	363	Rp 1,006,000
244	MANOKWARI	- TIMIKA	547	Rp 1,335,000
245	MASAMBA	- TANA TORAJA	100	Rp 320,000
246	MATAK	- NATUNA	293	Rp 826,000
247	MATAK	- PANGKAL PINANG	580	Rp 1,415,000
248	MATARAM	- MAKASSAR	600	Rp 1,464,000
249	MATARAM	- SUMBAWA	169	Rp 519,000
250	MATARAM	- SURABAYA	407	Rp 1,079,000
251	MATARAM	- WAINGAPU	411	Rp 1,089,000
252	MATARAM	- YOGYAKARTA	600	Rp 1,464,000
253	MAUMERE	- MAKASSAR	498	Rp 1,215,000
254	MAUMERE	- RUTENG	185	Rp 570,000
255	MAUMERE	- TAMBOLAKA	346	Rp 958,000
256	MAUMERE	- WAINGAPU	270	Rp 761,000
257	MEDAN	AEKGODANG	244	Rp 688,000
258	MEDAN	- GUNUNG SITOLI	278	Rp 784,000
259	MEDAN	- MEULABOH	297	Rp 835,000
260	MEDAN	- PADANG	537	Rp 1,310,000
261	MEDAN	- PEKANBARU	496	Rp 1,210,000
262	MEDAN	- SANANA	408	Rp 1,081,000
263	MEDAN	- SIBISA	111	Rp 356,000
264	MEDAN	SIBOLGA	269	Rp 759,000
265	MEDAN	- SILANGIT	176	Rp 542,000

266	MEDAN	- SINABANG	298	Rp	835,000
267	MEDAN	- TAPAK TUAN	183	Rp	564,000
268	MELAK	- SAMARINDA	159	Rp	490,000
269	MERAUKE	- SENGGO	379	Rp	1,039,000
270	MERAUKE	- TANAH MERAH	272	Rp	767,000
271	MERAUKE	- WAMENA	517	Rp	1,261,000
272	MERAUKE	WANAM	185	Rp	570,000
273	MEULABOH	- TAPAKTUAN	144	Rp	461,000
274	MINDIPTANAH	- TANAH MERAH	50	Rp	160,000
275	MOANAMANI	- WAGHETE	65	Rp	208,000
276	MOROTAI	- TERNATE	176	Rp	542,000
277	MUARATEWE	- PALANGKARAYA	176	Rp	542,000
278	NABIRE	- ENAROTALI	131	Rp	419,000
279	NABIRE	- KOKONAU	180	Rp	554,000
280	NABIRE	- MOANAMANI	122	Rp	390,000
281	NABIRE	- MULIA	283	Rp	798,000
282	NABIRE	- OBANO	112	Rp	358,000
283	NABIRE	- SERUI	187	Rp	576,000
284	NABIRE	TIMIKA	217	Rp	633,000
285	NABIRE	- WAGHETE	131	Rp	419,000
286	NAMLEA	- TALIABU	287	Rp	809,000
287	NANGAPINOH	- PONTIANAK	338	Rp	936,000
288	NUNUKAN	- TARAKAN	126	Rp	403,000
289	PADANG	- BENGKULU	439	Rp	1,163,000
290	PADANG	- JAMBI	423	Rp	1,121,000
291	PADANG	KERINCI	270	Rp	761,000
292	PADANG	- PALEMBANG	555	Rp	1,354,000
293	PADANG	- PEKANBARU	252	Rp	711,000
294	PALANGKARAYA	- BUNTOK	117	Rp	374,000
295	PALANGKARAYA	- KUALA KURUN	122	Rp	390,000
296	PALANGKARAYA	- PANGKALAN BUN	256	Rp	722,000
297	PALANGKARAYA	- SAMPIT	117	Rp	374,000
298	PALANGKARAYA	- TUMBANG SAMBA	141	Rp	451,000
299	PALEMBANG	- PANGKAL PINANG	204	Rp	628,000
300	PALEMBANG	- PEKANBARU	555	Rp	1,354,000
301	PALEMBANG	- RANAU	226	Rp	637,000
302	PALEMBANG	- TANJUNG PANDAN	380	Rp	1,040,000
303	PALEMBANG	- TANJUNG PINANG	376	Rp	1,039,000
304	PALU	- MAKASSAR	578	Rp	1,410,000

305	PALU	-	POSO	139	Rp	445,000
306	PALU	-	TOLI-TOLI	309	Rp	856,000
307	PANGKAL PINANG	-	PONTIANAK	473	Rp	1,180,000
308	PANGKAL PINANG	-	TANJUNG PANDAN	191	Rp	588,000
309	PANGKAL PINANG	-	TANJUNG PINANG	333	Rp	922,000
310	PANGKALAN BUN	-	SAMPIT	139	Rp	445,000
311	PANGKALAN BUN	-	SEMARANG	496	Rp	1,210,000
312	PANGKALAN BUN	-	SURABAYA	552	Rp	1,347,000
313	PEKANBARU	-	DUMAI	130	Rp	416,000
314	PEKANBARU	-	RENGAT	116	Rp	371,000
315	PEKANBARU	-	SINGKEP	491	Rp	1,198,000
316	PEKANBARU	-	TANJUNG BALAI KARIMUN	237	Rp	668,000
317	PEKANBARU	-	TANJUNG PINANG	374	Rp	1,037,000
318	POMALA	-	MAKASSAR	312	Rp	864,000
319	PONTIANAK	-	PANGKALAN BUN	424	Rp	1,124,000
320	PONTIANAK	-	PUTUSIBAU	413	Rp	1,094,000
321	PONTIANAK	-	SINTANG	232	Rp	654,000
322	PONTIANAK	-	TANJUNG PANDAN	343	Rp	950,000
323	PONTIANAK	-	TUMBANG SAMBA	127	Rp	406,000
324	POSO	-	BALIKPAPAN	547	Rp	1,335,000
325	POSO	-	GORONTALO	324	Rp	897,000
326	POSO	-	MAKASSAR	552	Rp	1,347,000
327	POSO	-	SOROAKO	185	Rp	570,000
328	PUTUSIBAU	-	BALIKPAPAN	547	Rp	1,335,000
329	PUTUSIBAU	-	SINTANG	196	Rp	604,000
330	RAHA/MUNA	-	MAKASSAR	333	Rp	922,000
331	RENGAT	-	TANJUNG PINANG	283	Rp	798,000
332	ROTE	-	KUPANG	121	Rp	387,000
333	ROTE	-	WAINGAPU	352	Rp	975,000
334	SAMARINDA	-	TANJUNG SANTAN	59	Rp	189,000
335	SAMARINDA	-	TANJUNG SELOR	341	Rp	945,000
336	SAMARINDA	-	TARAKAN	419	Rp	1,110,000
337	SAMPIT	-	SURABAYA	544	Rp	1,327,000
338	SAMPIT	-	TUMBANG SAMBA	122	Rp	390,000
339	SANANA	-	TERNATE	352	Rp	975,000
340	SARMI	-	SERUI	281	Rp	792,000
341	SAWU	-	WAINGAPU	170	Rp	524,000
342	SEMARANG	-	SURABAYA	309	Rp	857,000
343	SIBOLGA	-	GUNUNG SITOLI	148	Rp	474,000

344	SINABANG	- TAPAKTUAN	138	Rp	442,000
345	SINGKEP	- PANGKAL PINANG	256	Rp	722,000
346	SINGKEP	- RENGAT	254	Rp	716,000
347	SINGKEP	- TANJUNG BALAI KARIMUN	215	Rp	633,000
348	SINGKEP	- TANJUNG PANDAN	382	Rp	1,040,000
349	SINGKEP	- TANJUNG PINANG	224	Rp	636,000
350	SOLO	- SURABAYA	272	Rp	767,000
351	SOROAKO	- TANA TORAJA	181	Rp	557,000
352	SUMBAWA	- SURABAYA	568	Rp	1,386,000
353	SURABAYA	- KUALA PEMBUANG	467	Rp	1,179,000
354	SURABAYA	- YOGYAKARTA	402	Rp	1,065,000
355	TALIABU	- TERNATE	467	Rp	1,179,000
356	TAMBOLAKA	- LABUANBAJO	176	Rp	542,000
357	TAMBOLAKA	- WAINGAPU	137	Rp	438,000
358	TANA TORAJA	- MAKASSAR	228	Rp	643,000
359	TANJUNG KARANG	BENGGULU	375	Rp	1,039,000
360	TANJUNG PINANG	- MATAK	371	Rp	1,028,000
361	TANJUNG PINANG	NATUNA	596	Rp	1,454,000
362	TANJUNG PINANG	- TANJUNG BALAI KARIMUN	126	Rp	403,000
363	TANJUNG SANTAN	- TARAKAN	378	Rp	1,039,000
364	TANJUNG SELOR	- TARAKAN	59	Rp	189,000
365	TARAKAN	- TOLI-TOLI	426	Rp	1,129,000
366	TERNATE	- BULI	120	Rp	384,000
367	TIMIKA	- WAMENA	319	Rp	884,000

MENTERI PERHUBUNGAN,

ttd

FREDDY NUMBERI

SALINAN sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN



UMAR ARIS, SH, MM, MH

Pembina Tk.I (IV/b)

NIP. 19630220 198903 1 001